

BAB IV

TUJUAN TURKI DALAM OPERASI PEMBEBASAN MOSUL

Setelah diuraikan mengenai sikap pemerintah Turki dalam Operasi Pembebasan Mosul pada bab sebelumnya, maka bab ini akan menjelaskan lebih lanjut tujuan pemerintah Turki yang tetap berupaya untuk terlibat dalam operasi tersebut. Seperti yang sudah dipaparkan dalam Bab I, bahwa pemerintah Turki memiliki dua tujuan yaitu tujuan utama yang berupa menjaga keamanan, integritas dan stabilitas negaranya dari kelompok PKK serta tujuan jangka menengah yang berupa menyebarkan pengaruhnya serta mencegah dominasi kelompok Syiah di Mosul pasca dibebaskan dari pendudukan ISIS.

A. Mencegah Keterlibatan PKK (*Partiya Karkeren Kurdistan*) Dalam Operasi Pembebasan Mosul

Setiap kebijakan luar negeri yang diambil oleh suatu negara akan didasarkan pada tujuan yang ingin dicapai. Menurut K.J. Holsti, tujuan dalam kebijakan luar negeri adalah suatu gambaran keadaan peristiwa yang akan terjadi di masa depan dan rangkaian kondisi di kemudian hari yang ingin diwujudkan oleh pemerintah dengan cara membuat kebijakan luar negeri, menggunakan pengaruhnya di luar batas teritorial negara dan dengan mengubah atau mendukung sikap negara lain. Holsti membagi tujuan kebijakan luar negeri menjadi tiga, yaitu kepentingan inti, tujuang jangka menengah dan tujuan jangka panjang universal. (Holsti, 1981)

Tujuan inti adalah segala jenis tujuan yang untuk mencapainya kebanyakan orang akan bersedia melakukan berbagai macam upaya serta pengorbanan yang besar. Tujuan inti ini merupakan tujuan jangka pendek, karena tujuan lain tidak dapat dicapai apabila unit politik yang mengejarnya tidak dapat mempertahankan eksistensinya sendiri. Kepentingan dan nilai inti bagi masing-masing negara tentu tidak sama, namun kebanyakan pembuat kebijakan saat ini menempatkan

kedaulatan dan kemerdekaan serta mengekalkan sistem politik, sosial dan ekonomi menjadi tujuan utama dalam kebijakan luar negeri. Sehingga tujuan inti dapat dikatakan terkait dengan keberlangsungan hidup suatu negara.

Kebijakan Turki untuk tetap terlibat dalam Operasi Pembebasan Mosul meskipun mendapat penolakan dari pemerintah Iraq tentu diambil berdasarkan tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah Turki. Tujuan utama yang mendasari diambilnya kebijakan tersebut adalah mencegah keterlibatan kelompok PKK dalam Operasi Pembebasan Mosul. Tujuan ini dapat dimasukkan ke dalam kepentingan atau nilai inti karena menyangkut dengan keamanan, integritas dan stabilitas Turki. Apabila Kelompok PKK terlibat dalam Operasi Pembebasan Mosul maka pengaruh serta pergerakan PKK di luar wilayah Turki akan semakin besar yang dikhawatirkan dapat membahayakan keamanan dan kesatuan negara.

PKK (*Partiya Karkeren Kurdistan*) dibentuk pada tahun 1978 oleh Abdullah Ocalan. Tujuan awal kelompok ini adalah untuk mendirikan sebuah Negara Kurdistan yang independen dan sosialis di wilayah Turki tenggara. Namun seiring berjalannya waktu, kelompok ini hanya menuntut otonomi wilayah dan hak politik serta kebudayaan yang lebih luas untuk Suku Kurdi yang ada di Turki. Kelompok PKK seringkali terlibat konfrontasi dengan pemerintah bahkan melakukan penyerangan di berbagai wilayah di Turki. Karena aktivitas pemberontakan yang dilakukan tersebut, PKK merupakan kelompok terlarang bahkan dianggap sebagai organisasi teroris oleh pemerintah Turki, Amerika Serikat dan Uni Eropa.

Meskipun PKK muncul di Turki dan fokus pergerakannya adalah menuntut pemerintah Turki, akan tetapi kelompok ini juga berkembang hingga ke wilayah negara-negara tetangga seperti Syria utara dan Iraq utara. Pemerintah Turki telah melakukan berbagai upaya untuk memerangi kelompok PKK, termasuk memperbaiki hubungan bilateralnya dengan Syria, Iraq dan Iran. Untuk menghadapi strategi Turki tersebut, PKK kemudian bekerjasama dengan organisasi Suku

Kurdi lainnya yang ada di Syria, Iraq dan Iran, seperti *Kurdistan Democratic Solution Party* (Iraq), *the Democratic Union Party* atau *Partiya Yekîtiya Demokrat* (Syria) dan *the Party of Free Life for Kurdistan* atau *Partiya Jiyana Azad a Kurdistanê* (Iran). Pemerintah Turki juga bekerjasama dengan KRG untuk memerangi PKK karena markas utama kelompok tersebut berada di Pegunungan Qandil yang masuk ke dalam wilayah kekuasaan KRG. (International Crisis Group, 2012)

Gambar IV.1. Peta Keberadaan PKK di Iraq Utara



Source : TRT World

Pergerakan PKK di Iraq utara mengalami perkembangan ketika kelompok ini bergabung dalam operasi

militer untuk membebaskan Sinjar dari pendudukan ISIS. Sinjar merupakan sebuah kota yang terletak di sebelah barat laut Provinsi Nineveh. Kota ini berjarak 117 km dari Mosul dan termasuk dalam rute suplai ISIS yang menghubungkan Mosul dengan Raqqa di Syria. Sinjar didominasi oleh orang-orang Kurdi Yazidi yang menjadi korban kekerasan dan pembunuhan oleh ISIS selama menguasai wilayah tersebut. PBB memperkirakan sebanyak 3000 orang Yazidi dibunuh dan 6000 lainnya ditawan oleh kelompok ISIS. (Shackle, 2017) Pendudukan ISIS di Sinjar juga menyebabkan 200.000 orang Yazidi berupaya melarikan diri namun sebanyak 50.000 terlantar di Gunung Sinjar. (Burns, 2016)

Setelah ISIS berhasil menguasai Sinjar pada Agustus 2014, koalisi internasional yang dipimpin oleh Amerika Serikat segera melakukan operasi militer untuk merebut kembali kota tersebut. Operasi militer dilakukan dengan melibatkan kekuatan kelompok-kelompok Kurdi seperti Peshmerga, PKK, YPG (*Yekineyen Parastina Gel* atau sayap militer Kurdi Syria) dan YBS (*Yekineyen Berxwedana Sengale* atau milisi Yazidi Sinjar). Peshmerga melancarkan serangan ke Gunung Sinjar dari wilayah Rabia pada 19 Desember 2014. (Burns, 2016) Selain itu, upaya penyelamatan orang-orang Yazidi oleh kelompok-kelompok Kurdi termasuk PKK juga dilakukan tidak lama setelah ISIS berhasil menguasai Sinjar. Penyelamatan dilakukan dengan membuka rute mengungsi bagi orang Yazidi yang terlantar di Gunung Sinjar untuk mengungsi ke wilayah KRG dan wilayah kelompok Kurdi Syria di Syria utara. Setidaknya 30.000 orang Yazidi berhasil diselamatkan dalam upaya tersebut. (Middle East Eye, 2014)

Upaya merebut kembali Kota Sinjar berlangsung selama kurang lebih 15 bulan hingga kota tersebut berhasil dibebaskan dari ISIS pada November 2015. Amerika Serikat melakukan serangan udara terhadap ISIS di Sinjar pada 5 November 2015. Sementara itu, koalisi Kurdi yang mencakup PKK, YPG, YBS, dan Peshmerga melakukan serangan darat dari Gunung Sinjar lalu bergerak menuju ke dalam kota. Kelompok PKK yang terlibat dalam operasi militer tersebut

mendapatkan simpati dari YBS dan orang-orang Yazidi Sinjar. Sebelum jatuh pada pendudukan ISIS, Sinjar berada dalam kontrol KRG dan Peshmerga. Namun ketika ISIS memasuki Kota Sinjar pada Agustus 2014, militer Peshmerga justru meninggalkan kota dalam pendudukan ISIS. Hal tersebut menimbulkan kemarahan dan menurunnya kepercayaan orang-orang Yazidi terhadap Peshmerga. Peshmerga dianggap telah membiarkan ISIS melakukan pembantaian terhadap Yazidi di Sinjar. Kelompok PKK dan YPG kemudian memanfaatkan kondisi tersebut dengan masuk ke wilayah Sinjar dan menyelamatkan orang-orang Yazidi yang terlantar di Gunung Sinjar setelah melarikan diri dari ISIS. YPG dan PKK berhasil membuka rute aman untuk mengungsikan orang-orang Yazidi ke wilayah Rojava, Syria. Selain itu kedua kelompok tersebut juga membangun kamp pengungsi di Derik, Syria. (Dirik, 2014)

Lebih lanjut, YPG memberikan pelatihan militer kepada orang-orang Yazidi agar dapat memberikan perlawanan terhadap ISIS. Pelatihan tersebut dilakukan di pangkalan militer Qamishli, Syria. (Boudlal, 2014) Kelompok PKK juga ikut memberikan pelatihan militer kepada orang-orang Yazidi di sebuah kamp pelatihan dekat Kota Derik, Syria. Seorang Yazidi bernama Mohammed Maura memberikan pernyataan mengenai partisipasi orang-orang Yazidi dalam pelatihan militer untuk melawan ISIS, *"The PKK helped us to escape the area and to reach the safety of the camp, so why shouldn't join now?"*. (Sherlock, 2014) Lebih dari 1000 orang Yazidi mendapatkan pelatihan militer tersebut. Kelompok YBS juga beraliansi dengan PKK dan YPG untuk memperkuat perlawanan terhadap ISIS di Sinjar. (Burns, 2016) Peran penting PKK dan YPG dalam membebaskan Kota Sinjar merupakan sebuah peringatan bagi Turki bahwa pergerakan PKK di Iraq utara mengalami perkembangan yang cukup signifikan, terutama setelah PKK berhasil mendapatkan simpati dari orang-orang Yazidi dan YBS. PKK yang sangat mendukung feminisme dan peran perempuan dalam politik

juga mendirikan *Sinjar Women's Defense Unit* pada tahun 2015. (Ali O. , 2017)

Setelah berperan penting dalam membebaskan Kota Sinjar, Kelompok PKK juga menyatakan ingin terlibat dalam Operasi Pembebasan Mosul. Sarhad Wardo, kepala divisi hubungan media di *the Kurdistan Communities Union* (kelompok Kurdi yang berafiliasi dengan PKK), memberikan pernyataan, "*It is because of the cleanliness of our fight, the residents of Mosul have called for the PKK's participation*". (The New Arab, 2016) Keterlibatan PKK dalam Operasi Pembebasan Mosul menimbulkan kekhawatiran pemerintah Turki. Juru bicara kepresidenan Turki, İbrahim Kalın, menyatakan dalam sebuah konferensi pers tanggal 12 Oktober 2016 bahwa keterlibatan PKK dalam Operasi Pembebasan Mosul hanya akan menambah permasalahan di regional Timur Tengah. Lebih lanjut, ia menyatakan, "*Reports that the PKK may take part in the Mosul operation greatly worry us,*". (Daily Sabah, 2016)

Apabila PKK mendapat izin untuk terlibat maka hal tersebut maka PKK dapat semakin meningkatkan pengaruh serta menjadi entitas politik yang diakui eksistensinya. (Iddon, 2016) Oleh karena itu, pemerintah Turki juga ingin terlibat dalam Operasi Pembebasan Mosul agar dapat mencegah keterlibatan PKK dalam operasi tersebut. Bahkan pemerintah Turki meminta Amerika Serikat untuk tidak melibatkan PKK dan semua kelompok yang terafiliasi dengan PKK dalam Operasi Pembebasan Mosul. Amerika Serikat juga memberikan jaminan kepada Turki bahwa PKK dan aliansinya tidak akan terlibat dalam operasi militer tersebut. (Yetkin, 2016)

B. Mencegah Dominasi Syiah di Mosul Pasca Pendudukan ISIS

Holsti membagi tujuan jangka menengah menjadi tiga tipe, yaitu : 1. perbaikan ekonomi, 2. meningkatkan citra atau prestise negara, dan 3. perluasan diri baik dalam hal wilayah atau perluasan secara ideologis dan politik. Tujuan kedua pemerintah Turki yang ingin terlibat dalam Operasi Pembebasan Mosul termasuk ke dalam tujuan jangka menengah, yaitu mencegah dominasi Syiah di Mosul pasca dibebaskan dari penguasaan ISIS. Tujuan ini dimasukkan ke dalam tujuan jangka menengah karena merupakan upaya pemerintah Turki untuk memperkuat pengaruhnya di Iraq. Apabila Mosul dikuasai oleh kelompok Syiah pasca dibebaskan dari ISIS, maka Iran dapat menyebarkan pengaruhnya di Mosul karena pemerintah Iran memiliki kedekatan dengan kelompok-kelompok Syiah Iraq. Di sisi lain, sejak pasca pemerintahan Saddam Hussain, Turki dan Iran merupakan dua negara yang saling berkompetisi untuk memperkuat pengaruhnya di Iraq. Oleh karena itu, menjadi penting bagi pemerintah Turki untuk memastikan Mosul tidak dikuasai oleh kelompok Syiah sebagai upaya memperkuat pengaruhnya dan mengimbangi pengaruh Iran.

Sejak Amerika Serikat menarik pasukannya dari Iraq selama tahun 2009 hingga 2011, Turki dan Iran muncul sebagai dua kekuatan baru yang berkompetisi untuk menempatkan pengaruhnya di Iraq. Pasca kudeta terhadap rezim Saddam Hussain tahun 2003, Iran berupaya untuk memperbaiki hubungan bilateralnya dengan Iraq. Iran memanfaatkan hubungannya dengan aktor-aktor politik dan partai politik Iraq serta *soft power* yang dimiliki dalam sektor ekonomi dan agama untuk menyebarkan pengaruhnya di Iraq. Iran bekerjasama dengan kelompok Syiah dan aliansinya seperti *Islamic Supreme Council of Iraq (ISCI)*, *the Badr Organization*, dan *the Islamic Dawa Party* untuk mempengaruhi dinamika perpolitikan di Iraq. Tujuan Iran adalah menyatukan partai-partai yang ada di kelompok Syiah

sehingga mereka dapat memanfaatkan populasi Syiah yang merupakan mayoritas penduduk di Iraq untuk menjadi pengaruh politik di negara tersebut. Jika kelompok syiah memiliki pengaruh dalam perpolitikan Iraq maka kelompok ini kemudian dapat mengkonsolidasikan kontrolnya terhadap pemerintah. (Eisenstadt, 2011)

Aliansi-aliansi Iran memerankan peran penting dalam membentuk konstitusi dan institusi pemerintahan Iraq tahun 2005. Selanjutnya, Iran juga berupaya mempengaruhi hasil pemilu parlemen Iraq tahun 2005 dan 2010 serta pemilu daerah tahun 2009 dengan cara mendanai kandidat aliansinya seperti *The United Iraq Alliance* (UIA) yang merupakan koalisi partai-partai Syiah. Koalisi UIA saat ini sudah berganti nama menjadi *National Iraqi Alliance* (NIA) dan tetap didominasi oleh partai-partai Syiah. UIA atau NIA berhasil mendapatkan mayoritas suara dalam dua pemilu tersebut sehingga konsekuensinya adalah kelompok Syiah memiliki peran besar di pemerintahan Iraq. Pengaruh Syiah dan Iran di perpolitikan Iraq menjadi semakin kuat di masa Perdana Menteri Nouri al-Maliki karena al-Maliki memasukkan sekutu-sekutu Iran dalam pemerintahan. Sampai saat ini pemerintahan Iraq pun tetap didominasi oleh kelompok Syiah, bahkan Perdana Menteri Iraq, Haidar al-Abadi berasal dari partai Syiah (*Islamic Dawa Party*). Meskipun demikian, pemerintahan Haidar al-Abadi lebih banyak mendapatkan dukungan dari masyarakat Sunni dan Kurdi dibandingkan pemerintahan yang sebelumnya. (Eisenstadt, 2011)

Selain menggunakan jalan politik, Iran juga menggunakan *soft power* untuk menyebarkan pengaruhnya di Iraq. Misalnya, dalam sektor ekonomi Iran merupakan partner dagang yang penting bagi Iraq. Jumlah volume perdagangan kedua negara tersebut mencapai 5 milyar dollar Amerika pada 2013 dan 2014. Iran banyak melakukan ekspor ke Iraq seperti makanan, material, peralatan rumah tangga hingga perlengkapan mobil. Investor-investor dari Iran juga banyak beroperasi di Baghdad, Iraq selatan dan *Kurdistan Regional*. Selain melalui ekonomi, Iran juga menyebarkan pengaruhnya

melalui media elektronik terutama berita-berita di televisi, meskipun cara tersebut tidak terlalu efektif. (Eisenstadt, Policy Analysis : Iran and Iraq, 2015)

Meskipun Iran memiliki pengaruh dalam perpolitikan Iraq, tetapi negara tersebut ternyata tidak mendapatkan kepercayaan yang cukup dari penduduk sipil Iraq. Hal tersebut dibuktikan dengan survey yang dilakukan oleh *the Princeton-based Pechter Middle East Polls* terhadap 3000 penduduk Iraq sebagai sample pada Maret 2010. Hasil survey menunjukkan data-data sebagai berikut : (Pollock, 2010)

1. Hanya 18% diantara responden Syiah yang berpandangan positif terhadap hubungan Iran dengan aktor-aktor politik Iraq. Sedangkan dua pertiga responden Sunni tidak menyukai kedekatan hubungan antara Iran dengan aktor politik Iraq. Bahkan sebanyak 67% responden Kurdi juga menolak hubungan Iran dengan aktor politik Iraq. Berdasarkan data ini maka dapat dikatakan bahwa penduduk Iraq tidak menyukai intervensi Iran di perpolitikan negaranya.
2. Sebanyak 58% diantara responden Syiah menganggap Iran memiliki pengaruh yang besar dalam pendanaan kampanye beberapa kandidat di pemilu 2010. Sedangkan 60% responden Sunni menyatakan Iran memiliki pengaruh yang besar dalam segala aspek proses pemilu.
3. Sebanyak 48% responden Syiah dan 74% responden Sunni mengatakan bahwa Iran memiliki pengaruh besar dalam aktivitas militer selama pemilu 2010.
4. Sebanyak 52% diantara responden Syiah tidak menyukai Presiden Iran saat itu, Mahmoud Ahmadinejad.

Penelitian lain juga dilakukan pada Agustus 2010 dengan menanyakan kepada masyarakat Iraq mengenai negara yang dapat berpengaruh buruk bagi pembentukan pemerintahan pasca pemilu 2010. Hasil penelitian tersebut

menunjukkan Iran (41,2%), Amerika Serikat (31,5%), negara-negara teluk (11,6%), Arab Saudi (8,9%), Turki (5%), dan Syria (2,3%). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa meskipun Iran memiliki pengaruh yang cukup besar dalam perpolitikan Iraq, namun citra Iran di kalangan penduduk sipil Iraq tidak cukup baik. Justru pada hasil penelitian tersebut, citra Turki di kalangan penduduk sipil Iraq lebih baik daripada Iran.

Melihat upaya Iran dalam menyebarkan pengaruhnya di Iraq, maka menjadi penting bagi Turki untuk turut memperkuat pengaruhnya agar dapat mengimbangi Iran. Persaingan politik dua negara tersebut tampak pada pemilu Iraq tahun 2010. Jika Iran memberikan dukungannya kepada koalisi *National Iraqi Alliance* yang didominasi oleh kelompok Syiah, maka Turki mendukung koalisi *al-Iraqiyya* yang berpaham sekuler. Selain Iran, Turki juga merupakan partner dagang yang penting bagi Iraq. Pada tahun 2010 jumlah volume perdagangan Iran-Iraq mencapai 5 milyar dollar Amerika, sedangkan jumlah volume perdagangan Turki-Iraq mencapai 6 milyar dollar Amerika. Perusahaan dan investor Turki banyak beroperasi di wilayah Iraq utara, sedangkan perusahaan dan investor Iran banyak beroperasi di wilayah Iran selatan serta ibukota. Untuk itu, menteri luar negeri Iraq tahun 2010, Hoyshar Zebari menyatakan bahwa Turki dan Iran adalah aktor eksternal sekaligus rival yang memiliki pengaruh di Iraq. Keinginan Iran untuk membentuk pemerintahan Iraq yang didominasi oleh Syiah dapat memberikan ancaman bagi negara-negara Sunni seperti Turki. Oleh karena itu, menjadi penting bagi pemerintah Turki untuk mempertahankan pengaruhnya serta mencegah dominasi Syiah dan Iran baik di Mosul maupun di Iraq secara lebih luas. (Kane, 2011)

Kemunculan ISIS di Iraq memberikan ancaman sekaligus peluang bagi Iran. ISIS merupakan kelompok militan Sunni yang sangat memusuhi Syiah sehingga Iran menjadi musuh utama bagi ISIS. Kehadiran ISIS yang mampu menguasai sepertiga wilayah Iraq tidak hanya memberikan

ancaman bagi pemerintah Iraq tetapi juga ancaman bagi kepentingan Iran. Namun, di sisi lain keberadaan ISIS membuka peluang bagi Iran untuk menunjukkan pengaruh dan kekuatannya di Timur Tengah. Kampanye anti ISIS oleh pemerintah Iran menjadi pengingat bagi masyarakat Iraq bahwa Iran adalah aktor yang terkuat di Iraq. Pemerintah Iraq pun mengandalkan milisi Syiah yang memiliki kedekatan dengan Iran untuk menghentikan perkembangan kelompok ISIS. (Nader, 2015)

Iran juga mengirim cabang militernya yang dikenal dengan *Islamic Revolutionary Guards Corps* (IRGC). IRGC berpartisipasi dalam operasi militer untuk membebaskan Kota Amirli di Provinsi Salah al-Din dari kepungan ISIS. Selain itu, pembebasan Kota Jurf Al-Sakhar juga dilakukan oleh pemerintah Iraq bersama dengan Iran dan 15.000 milisi yang hampir seluruhnya adalah Syiah. Operasi militer di Jurf Al-Sakhar tersebut menandakan peningkatan peran kelompok Syiah dan Iran dalam membebaskan kota-kota Iraq yang dikuasai ISIS. Pada November 2014, Iran menjadi sorotan dunia internasional ketika militernya berhasil melakukan serangan udara terhadap ISIS di Provinsi Diyala. Untuk memerangi ISIS di Iraq, Iran lebih memilih bekerjasama dengan milisi Syiah dibandingkan dengan militer Iraq. (Nader, 2015)

Dua hari setelah ISIS berhasil menguasai Mosul pada Juni 2014, Iran segera mengirimkan bantuannya berupa penasehat-penasehat militer beserta senjata. Seperti yang sudah disebutkan dalam sub bab Operasi Pembebasan Mosul bahwa penasehat tinggi IRGC memberikan pernyataan Iran akan terlibat dalam operasi tersebut dengan menyediakan penasehat serta ahli militer untuk pemerintah Iraq dan PMF sebagai bentuk dukungan. *The Badr Organization*, milisi Syiah yang memiliki hubungan sangat dekat dengan Iran juga terlibat di PMF untuk memerangi ISIS di Mosul. Melihat pemerintah Iraq menerima bantuan militer dari Iran serta melibatkan PMF dalam Operasi Pembebasan Mosul, maka pemerintah Turki memutuskan untuk ikut terlibat dalam

operasi tersebut. Seperti yang sudah dipaparkan dalam bab sebelumnya, bahwa keterlibatan pemerintah Turki ditunjukkan dengan mengirim senjata dan pasukan serta melakukan pelatihan militer dengan Peshmerga dan milisi Sunni *Nineveh Guard*.

Kebijakan pemerintah Turki tersebut diambil berdasarkan tujuan pemerintah yang ingin memperkuat pengaruhnya di Mosul serta mencegah dominasi milisi Syiah pasca Mosul dibebaskan dari ISIS. Apabila Mosul dikuasai oleh Syiah maka dampak yang timbul adalah Iran dapat menyebarkan pengaruhnya di Mosul dan Iraq secara lebih luas melalui milisi-milisi Syiah yang menjadi aliansinya. Oleh karena itu, menjadi penting bagi pemerintah Turki untuk memperkuat pengaruhnya agar dapat mengimbangi Iran.

